

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong Penulis dalam mengambil judul mengenai “Peran Bantuan Jepang dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia “ karena menurut Penulis masalah pendidikan merupakan suatu masalah yang sangat penting dalam membangun suatu bangsa, dan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di tiap negara, dalam hal ini Indonesia. Apalagi dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, dan Jepang merupakan salah satu negara yang kaya telah banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah membantu memajukan pendidikan di Indonesia.

Pada awal abad XXI ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang

lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.¹

Pada saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi. Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antar tingkat pendapatan penduduk.²

Manajemen pendidikan nasional secara keseluruhan masih bersifat sentralistis sehingga kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistis tersebut telah menyebabkan kebijakan yang seragam yang tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman / kepentingan daerah / sekolah / peserta didik, mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan

¹ Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, Pembangunan Pendidikan, dalam [http:// www.Yahoo.com](http://www.Yahoo.com)

² [http:// www.Yahoo.com](http://www.Yahoo.com)

peningkatan *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan *kualitas pendidikan* merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha *pembangunan pendidikan* yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan.³

3.

Sebagaimana kita ketahui, pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah jika di bandingkan dengan negara lain di asia seperti ; Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Meskipun pada kenyataannya hampir semua negara yang sedang berkembang juga menghadapi masalah sumber daya manusia yang sama yaitu masalah pendidikan. Kualitas pendidikan yang terjadi di sebagian besar negara berkembang pada saat ini masih memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat dari presentasi tingkat melek huruf dan buta huruf di berbagai negara tetangga diantaranya, Korea Selatan 97,9%,China 90,9%, India 61,3%, Vietnam 90,3%, Kamboja 69,4%, Myanmar 85,3% Malaysia 88,7%, Indonesia 87,9%, Thailand 92,6%, Filipina 92,6% dan Brunai Darussalam 93,9%, dan Laos 66,4%, dimana presentase tersebut menunjukkan wajah pendidikan di negara Asia dan juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia di masing-masing negara tersebut.⁴ Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak di perlukan karena sumber daya manusia yang baik akan memberikan banyak manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁵

Selain hal di atas kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut juga tercermin, antara lain, dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh organisasi International Educational Achievement (IEA) yang menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi

⁴ *Kompas*, 4 September 2004

⁵ Ferry Andrianus, " *Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.*"

untuk kemampuan matematika siswa SLTP di Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara, dan untuk kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada pada urutan ke-40 dari 42 negara peserta.

Dengan berbagai masalah yang ada di atas, Peran pemerintah sendiri seharusnya sangat dibutuhkan dalam menyikapi masalah ini, tetapi pada kenyataan peran dan perhatian pemerintah tersebut masih lamban dalam menyikapi masalah pendidikan, sehingga sedikit banyaknya berpengaruh buruk terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Mengenai pemerataan pendidikan dasar dan menengah yang belum tercapai berdasarkan data Balitbang Depdiknas tahun 2003, dapat dilihat berdasarkan angka putus sekolah dari golongan usia, dimana pada usia 0-6 tahun berjumlah 19 Juta atau 73%, dan pada usia 7-12 tahun berjumlah 2 Juta atau 6%, sedangkan pada usia 13-15 tahun berjumlah 7 Juta atau 55%. Selain dapat dilihat dari angka putus sekolah, pemerataan sekolah yang belum tercapai itu juga dapat dilihat dari jumlah ruang sekolah yang rusak. Di tingkat SD dari 801,216 ruang kelas, yang rusak sebanyak 168,655 (21%), sedangkan di tingkat SLTP/ SMU dari 184,707 ruang kelas, yang rusak sebanyak 29,522 (16%).⁶

Pemerataan pendidikan dasar dan menengah yang kurang ini setidaknya disebabkan oleh 2 hal: (1) perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan

Sedangkan anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sangat rendah, masih kalah dibanding dengan negara-negara miskin di Asia, misalnya Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Kamboja, Afghanistan, India dan Myanmar. Rata-rata negara di Asia menempatkan anggaran pendidikan secara nasional di atas 3 persen dari GNP. Sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan pembiayaan pendidikan sebesar 0,8 persen dari GNP.

Akibatnya biaya pendidikan di Indonesia terlalu mahal untuk kemampuan ekonomi masyarakat. Bukan hanya dalam perguruan tinggi, biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah masih sangat mahal bagi masyarakat kita. Biaya pendidikan yang harus ditanggung untuk memasuki sistem sekolah sangat beragam dan jumlahnya pun sangat besar, mulai dari uang bangunan, uang buku, uang seragam, uang ujian, belum lagi pungutan-pungutan lainnya. Dengan jumlah pengangguran tinggi dan pendapatan sebagian besar penduduk yang rendah, besarnya biaya yang harus ditanggung untuk bersekolah tidak dapat ditanggulangi sendiri oleh masyarakat.⁷

Rendahnya kualitas hasil pendidikan itu berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Human Development Reports, HDR 2002 (Laporan Pembangunan Manusia 2002) yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme, UNDP) tentang Human Development Indicators 2002, Indonesia menempati peringkat 110 dari

⁷ [http : //www.suara.pembaruann.com](http://www.suara.pembaruann.com).

173 negara yang diteliti dengan *Human Development Index* (HDI) 0.684.⁸ Posisi Indonesia itu jauh di bawah negara anggota ASEAN, misalnya Singapura (25), Brunei Darussalam (32), Malaysia (59), Thailand (70), Vietnam (109). Kemudian pada *Human Development Reports* 2003, indeks tersebut merosot menjadi 0,682. Penurunan indeks yang mencerminkan memburuknya kualitas manusia Indonesia ini juga terlihat dari menurunnya peringkat HDI, dari urutan 110 ke 112, sementara Malaysia naik ke peringkat 58 dan Vietnam urutan ke 109.⁹

Padahal pendidikan sudah dipahami sebagai salah satu hak mendasar manusia oleh Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia, atau dalam berbagai konvensi internasional, dan dalam konstitusi 1945 pun diamanatkan secara tegas pada pasal 31, bahwa (i) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (ii) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan (iii) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula di dalam amandemen ke-IV undang-undang dasar tersebut lebih diperjelas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara. Dan negara Indonesia merupakan salah satu

negara yang dalam undang undang dasarnya mencantumkan pendidikan sebagai hak asasi manusia. Oleh sebab itu pembangunan pendidikan sangat penting bagi negara.¹⁰

Pancasila sebagai idiologi negara dan bangsa Indonesia meletakkan aspek ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertamanya. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia dipahami sebagai usaha untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya (spritual material), yang tidak memisahkan penguasaan ilmu pengetahuan dari nilai etika (yang diturunkan dari nilai-nilai absolut keagamaan).

B. Tujuan Penulisan

1. Memberikan gambaran sejauh mana peran Jepang dalam membantu pendidikan di Indonesia.
2. Mencoba mengaplikasikan ilmu dan teori yang pernah penulis peroleh pada masa studi ke dalam bentuk tulisan.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Fisipol Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C Latar Belakang Masalah

Jepang merupakan negara yang unik, yang ditandai dengan karakteristik ekonominya yang sangat kuat. Meskipun Jepang sebenarnya merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam, namun Jepang dapat secara agresif mengkonsolidasikan posisinya sebagai negara yang berhasil dalam perekonomiannya.

¹⁰ <http://www.kemendiknas.go.id>

Ekonomi Jepang telah kuat sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelum perang, banyak produk Jepang yang diekspor. Kini lebih banyak barang yang dihasilkan pabrik di Jepang diperuntukkan bagi konsumsi dalam negeri. Namun, Perdagangan luar negeri masih diperlukan, karena tanpa itu, ekonomi Jepang akan berantakan. Karena Jepang sendiri hanya memiliki sumber alam sedikit, sebagian besar ekonomi Jepang tergantung pada pembelian bahan mentah dari negara lain, lalu mengubahnya menjadi barang barang yang diinginkan oleh pabrik pabrik Jepang, yang kemudian menjualnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Sebelum Perang Dunia II, langkah pertumbuhan ekonomi Jepang bertumpu pada tahun 1868, dimana pada saat itu terjadi suatu fenomena yang membuka zaman baru bagi jepang yang mengantarkannya ke reformasi ekonomi, sosial dan politik, yang kemudian menempatkan Jepang ke dalam suatu era modernisasi.

Sebelum tahun 1868, selama kurang lebih 250 tahun Jepang relatif mengalami masa damai dan masa isolasi dari bagian dunia lainnya, yaitu pada masa pemerintahan Ieyasu Tokugawa (pemerintahan shogun) yang memerintah sangat mutlak dengan bentuk negara polisional yang berdasar atas asas feodalisme. Pada masa ini rakyat di bagi menjadi empat golongan, yaitu golongan samurai (ksatria/ angkatan bersenjata), golongan petani, pengrajin dan pedagang. Dan akhirnya pada tahun 1854 seorang perwira angkatan laut Amerika berhasil menekan Jepang untuk membuka pintu bagi hubungan luar negeri, yang kemudian disusul dengan runtuhnya rezim Tokugawa dan kembalinya kekuasaan kepada Kaisar. Peristiwa tersebut dikenal dengan *Bastorasi meiji* yang menjadi tanda

perubahan rezim lama menjadi baru. Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan penting menuju ke arah modernisasi.

Pada masa ini telah terjadi perubahan-perubahan dimana aspek yang menonjol dalam pembangunan ekonomi Jepang adalah meningkatnya industri tekstil katun, yang pada akhirnya merupakan awal perkembangan penanaman modal di luar negeri, karena berdirinya pabrik pemintalan Jepang pertama di Shanghai pada tahun 1911 dan selain itu di sektor pertanian terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan tradisional yaitu meningkatnya indeks produksi pertanian, dimana padi dan sutera merupakan produksi pertanian yang besar. Menjelang meletusnya Perang Dunia I, terjadi industrialisasi dengan impor teknologi yang semakin lama semakin banyak, dimana pada tahun 1914-1919 adalah tahun yang paling makmur dan PD I telah mengubah ekonomi Jepang. Selama periode 1914-1919 perdagangan mencapai surplus, produksi dalam bidang perindustrianpun meningkat yang menjadikan impor terhenti, sedangkan ekspor terus membubung tinggi.

Akan tetapi, ledakan kemajuan (Boom) setelah peperangan ini berakhir dalam tahun itu juga dan terjadilah serangkaian kepanikan, yang memuncak dalam Embargo standar Emas pada tahun 1930 yang bertepatan dengan depresi besar sejangat awal tahun 1930-an, dimana menunjukkan majunya ekonomi Jepang dari segi ekspor, impor dan cadangan mata uang sebelum tahun 1930 dan menurunnya ekonomi Jepang awal tahun 1930-an.

Tetapi, meskipun begitu ekonomi Jepang dapat pulih dan tumbuh kembali

Jepang sangat pesat dalam tahun 1930-an, ekspor produksi industri ringan meningkat

mendominasi dipertengahan decade. Menjelang akhir tahun 1930-an Jepang mempunyai industri berat yang telah berkembang. Perkembangan dan peningkatan industri berat menyebabkan beberapa pemusatan industri. Pada akhir periode ini mulai adanya pengaruh dan peran dari Zaibatsu (gabungan perusahaan dagang yang dikuasai oleh keluarga), seperti Mitsui dan Mitsubishi yang menjadi kuat dan dominan serta mempunyai kepentingan dalam berbagai kegiatan industri.

Sedangkan perekonomian Jepang pasca Perang Dunia II, pada agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan jepang dalam Perang Dunia II, setelah diledakkan dua atom di Hiroshima dan Nagasaki membawa banyak kerugian bagi jepang, dan semakin memperberat perekonomian Jepang. Hal tersebut menjadikan Jepang mengalami kelumpuhan di hampir semua bidang, baik itu secara ekonomi maupun militer, dan bukan itu saja rakyat Jepang juga banyak mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental (pskologis).

Namun, kekalahan Jepang pada Perang dunia II telah memicu semangat untuk mencapai keberhasilan dan kejayaan masa lampau. Dengan semangat dan keinginan untuk maju Jepang kemudian berusaha untuk membangun perekonomiannya yang sempat goyah karena kekalahan tersebut. Sekitar 20 tahun dari kekalahan tersebut Jepang telah tumbuh menjadi negara yang kuat perekonomiannya. Dengan keberhasilan jepang mempertahankan ekonominya, secara tidak langsung telah mensejajarkan Jepang dengan negara negara Barat yang ekonominya telah mapan.¹¹

¹¹ Tentang Perkembangan ekonomi Jepang dapat dilihat dalam Yoshihara Kunio, *Perkembangan Ekonomi Jepang: Sebuah Rancangan* Gramedia, Jakarta, 1982

Keberhasilan Jepang tampak sering mendapat sorotan dari masyarakat internasional dan hanya memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu Jepang kemudian ikut aktif dan ambil bagian dalam percaturan dunia dengan usaha membantu pembangunan negara berkembang, terutama kawasan Asia Pasifik dimana Jepang merupakan aktor ekonomi dikawasan tersebut. Fokus perhatian Jepang juga pada Asia, khususnya Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Hubungan Indonesia-Jepang yang telah berlangsung beberapa periode memberi manfaat bagi keduanya. Hubungan antara keduanya berjalan cukup baik. Walaupun demikian pernah mengalami pasang surut.

Interaksi antara kedua negara sebagai suatu entitas politik sebenarnya telah tampak setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Sebagai suatu negara yang pernah menjajah Indonesia, Jepang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pampasan perang kepada Indonesia. Tetapi justru karena persoalan ini menghambat rencana kedua negara untuk melakukan hubungan diplomatic. Persoalan ini baru dapat di atasi setelah Perdana Menteri Kishi berkunjung ke Indonesia pada tahun 1957. Satu tahun kemudian Indonesia dan Jepang sepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian, Perjanjian Pampasan Perang dan perjanjian perjanjian lainnya. Perjanjian-perjanjian inilah yang kemudian membawa kedua negara pada pembukaan hubungan diplomatic pada Tanggal 15 April 1958.¹²

Hubungan antara Jepang dengan Indonesia sudah terjalin sejak tahun 1950-an tersebut, yang dimulai dengan pembayaran ganti rugi akibat perang kepada

Indonesia yang pernah diduduki Jepang pada saat perang dunia kedua. Pembayaran ganti rugi tersebut kemudian diteruskan oleh Jepang dengan memberikan bantuan ekonomi. Jumlah bantuan Jepang yang mengalir melalui hubungan bilateral maupun multilateral terus mengalami peningkatan.¹³

Dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Jepang dengan Indonesia Ada tiga prioritas. Pertama, hubungan ekonomi dengan mendatangkan investasi lebih banyak lagi dari Jepang. Kedua, membantu Indonesia dalam program reformasi di segala bidang dan meningkatkan rasa saling memahami satu sama lain. Ketiga yaitu pada pertukaran budaya kedua negara

Adapun bentuk dari hubungan antara Indonesia dan Jepang adalah hubungan ekonomi, dan hubungan non ekonomi. Dalam hubungan ekonomi dengan Jepang yaitu bidang investasi, perdagangan dan bantuan luar negeri. Di Indonesia investasi Jepang sangat besar, sebagaimana kita ketahui perusahaan Jepang yang ada di Indonesia berjumlah 875 perusahaan, yang terdiri dari berbagai jenis industri. Dan total investasi Jepang di Indonesia berjumlah 11 miliar dollar AS, dengan jumlah karyawan 282.000 orang.¹⁴ Sedangkan dalam hubungan non ekonomi dalam hal ini yaitu pendidikan, kontribusi Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia juga sangat besar, hal ini dapat di lihat dari bantuan yang diberikan Jepang pada Indonesia baik itu berupa, bantuan dana untuk perbaikan infrastruktur sekolah, beasiswa, bantuan teknik, kerjasama antar lembaga pendidikan, dll yang mana bantuan tersebut sangat membantu dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

¹³ *Deh Widayastana, Dampak hubungan Jepang - Indonesia dalam* <http://www.liputan6.com> id

Di dalam membicarakan hubungan Jepang-Indonesia tidak lepas dari masalah bantuan luar negeri yang diterima Indonesia sejak dimulainya hubungan kedua negara tersebut. Diantara negara-negara Asia penerima bantuan Jepang, Indonesia menduduki prioritas utama dalam kebijakan bantuan Jepang. Hal ini berarti bahwa bantuan luar negeri merupakan faktor dominan dalam hubungan antara Jepang dan Indonesia.

Sebagai faktor dominan, bantuan luar negeri memainkan peranan yang penting dalam hubungan Jepang-Indonesia. Sehingga pasang surut dalam hubungan tersebut bisa mempengaruhi jumlah bantuan yang diberikan atau sebaliknya, Jumlah bantuan akan mengalami perubahan manakala terdapat masalah dalam hubungan kedua negara.¹⁵

Holsti berpendapat bahwa hal penting yang mendasari hubungan antar negara disebabkan oleh adanya karakteristik geografis, demografis, sumber daya suatu negara yang berbeda beda. Hubungan timbal balik Jepang Indonesia, merupakan perwujudan dari adanya kepentingan kedua negara tersebut yang memiliki karakteristik politik, ekonomi, geografis, demografis, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berbeda. Dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia, bantuan ekonomi dari Jepang merupakan faktor strategis dalam hubungan Jepang-Indonesia. Bantuan luar negeri, biasanya menguntungkan kedua belah pihak ; negara donor dan negara penerima bantuan. Negara penerima bantuan (*resipien*) menerima bantuan berupa uang, pinjaman, sarana dan prasarana atau terget yang di harapkan mampu menciptakan ekonomi yang

¹⁵ G. H. Holsti, "The Structure of Foreign Policy: The Case for Neorealism", *International Journal of*

modern, stabilitas politik dan keamanan militer. Negara donor tanpa memperhatikan jenis persyaratan yang melekat selalu mengharapkan beberapa keuntungan politik atau ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di jelaskan di atas maka dapat di tuliskan di sini permasalahannya adalah “Bentuk bantuan apa saja yang dilakukan Jepang dalam membantu pendidikan di Indonesia ?”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau fenomena tertentu. Konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.¹⁷

Dalam membahas masalah ini, penulis akan menggunakan **Konsep Kepentingan Nasional** (National interest), untuk membantu menjelaskan kepentingan suatu negara dalam hal ini yaitu Kepentingan Jepang dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Konsep kepentingan nasional ini sering di pakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional.¹⁸

Saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa hidup sendirian. Semua bangsa melakukan hubungan dengan negara lain dan harus memisahkan politik luar negerinya dengan politik dalam negerinya. Politik luar negeri di gunakan

¹⁶ K.J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis Jilid I*, terjemahan M.T. Azhary Erlangga Jakarta, 1988, hlm. 104 dan 321.

¹⁷ *Makna dan Fungsi Konsep*

sebagai pengejawantahan kepentingan nasional suatu negara terhadap negara lain.¹⁹

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus di capai di luar batas wilayahnya. Kepentingan suatu negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya. Tujuan politik luar negeri untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu negara. Politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Berkaitan dengan Kepentingan Nasional ini, Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa :

*“ National interest is the fundamental and ultimate determinan that guides the decision makers of state in making foreign policy the national interest of a state is typical a highly generalized conception of those elements that constitute the state most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being. ”*²⁰

Dari penjelasan tersebut dapat di artikan bahwa Politik Luar Negeri suatu negara adalah strategi atau serangkaian kegiatan yang terencana dan dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau terhadap suatu entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang berdefinisi interen bagi kepentingan nasionalnya. Meskipun tujuan politik luar negeri suatu negara dengan negara lain berbeda, tetapi pada umumnya

¹⁹ SL Roy, *Diplomasi*, terjemahan Harwanto dan Mirsawati, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 31.

berkisar pada beberapa hal, misalnya perlindungan diri sendiri, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer dan ekonomi.

Kepentingan Nasional melukiskan aspirasi suatu negara secara operasional, dalam penerapannya berupa tindakan atau kebijaksanaan yang aktual yang terencana yang di tujukan oleh suatu negara. Jika dilihat dari beberapa tujuan luar negeri suatu negara seperti yang telah dijelaskan di atas, maka kepentingan nasional Jepang dalam hal pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia lebih ditekankan pada kesejahteraan ekonominya. Hal ini juga dapat di lihat dari hubungan kerja sama Indonesia-Jepang baik di bidang perdagangan maupun investasi yang telah berlangsung sejak lama.

Konsep- konsep tentang bantuan luar negeri yaitu :

a. Bantuan Luar Negeri

K.J. Holsti mendefinisikan bantuan luar negeri atau bantuan asing sebagai pemindahan keuangan, barang atau bantuan teknis dari negara donor ke negara penerima bantuan.²¹

b. Hibah

Hibah secara harfiah berarti memindahkan barang-barang atau teknologi ke negara lain secara cuma-cuma.²²

c. Kerjasama Regional

Persekutuan atau kerjasama di antara negara-negara yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi, politik dan militer, di antara negara-negara dalam suatu kawasan.²³

²¹ K. J. Holsti, *Op cit* Tindakan dan Wawasan Luanda, Dinas Cista Bandung, 1978, hal 321

d. Technical Assistance (Bantuan tehnik)

Program bantuan tehnik diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang dalam rangka membantu perkembangan ke arah pencapaian tujuan modernisasi. Program bantuan tehnik berusaha untuk memajukan pembentukan keahlian d bidang industri, manajerial, pendidikan, kesehatan, pertanian, pertambangan dan pemerintahan.²⁴

F. Hipotesa

Melihat dari pokok permasalahan maka didapat suatu hipotesa bahwa ada beberapa bentuk bantuan yang dilakukan Jepang dalam membantu pendidikan di Indonesia yaitu :

a. Bantuan keuangan

Bantuan keuangan yang merupakan bantuan pembangunan resmi jangka panjang dengan bunga rendah. Pinjaman ini disalurkan oleh ODA.

b. Bantuan Hibah

Bantuan ini merupakan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma. Bentuknya bisa berupa uang, beasiswa dan peralatan teknis.

c. Bantuan Teknis

Bantuans berupa pengiriman barang-barang atau peralatan ataupun tenaga ahli yang dibutuhkan oleh negara penerima bantuan. Bantuan ini biasanya disalurkan oleh JICA (Japan Internasional Cooperation Agency).

²³ B.N. Marbun, *Kamus politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003

²⁴ Jack C. Blane, Roy Olsen, *Kamus hubungan Internasional*, edisi ketiga, Terjemahan Wawan

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan batasan masalah mengenai bantuan Jepang dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia yang di mulai pada tahun 2001-2004. Penulis mengambil batasan masalah pada tahun tersebut karena sebelumnya sejak Indonesia mengalami krisis multidimensi, salah satunya bidang pendidikan yang sampai sekarang masih kurang perhatian dari pemerintah, seperti turunnya anggaran dana pendidikan, pendidikan yang masih belum merata. Oleh karena untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, bantuan luar negeri sangat dibutuhkan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengutip kejadian-kejadian di tahun-tahun sebelumnya selama masih relevan dengan masalah yang di bahas.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat literasi atau pengumpulan data berdasarkan pada penelitian kepustakaan. Data-data yang penulis peroleh berupa buku literatur, surat kabar, Internet, artikel-artikel yang mempunyai kaitan dengan masalah peran bantuan Jepang kepada Indonesia

I. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I.

Dalam bab ini akan diuraikan Alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan, kerangka penulisan, dan rencana kepustakaan.

BAB II.

Membahas mengenai, Sejarah keberhasilan ekonomi Jepang, Kebijakan luar negeri Jepang di bidang kerjasama pendidikan, tujuan pendidikan, hubungan ekonomi Jepang dan Indonesia di bidang investasi, perdagangan dan bantuan luar negeri,

BAB III.

Membahas mengenai keadaan Pendidikan di Indonesia, Definisi pendidikan, Dasar pendidikan, Fungsi pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia; Pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

BAB IV.

Membahas mengenai, Bantuan Keuangan, Hibah dan kerjasama teknis.

BAB V.

Membahas tentang kesimpulan dan saran.